

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
I Informasi Persandian/ Kemananan Informasi					
1	<p>Dokumen persandian, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Radiogram/kawat bersandi, berita sandi; - Spesifikasi dan perangkat khusus sarana komunikasi persandian; - Kunci sistem, frekuensi radio komunikasi, jalur komunikasi VVIP, serta tempat jaringan, peralatan, dan kegiatan persandian. <p>OPD yang mengecualikan : Dinkominfo</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. 	2 Tahun	Terjadinya penyadapan	Melindungi informasi bersandi dari kebocoran
2	<p>Dokumen Internet Protokol/ IP address private, bandwidth management, kode akses elektronik, sistem keamanan elektronik, sistem management database</p> <p>OPD yang mengecualikan : Dinkominfo</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf I Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 - Pasal 30 s/d pasal 37 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 	2 Tahun	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data	Melindungi/mengamankan perangkat serta data

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
3	Laporan IT Security Assessment Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 OPD yang mengecualikan : Dinkominfo	Pasal 30, 31 dan 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	2 Tahun	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data, pencurian akses internet	Melindungi/mengamankan perangkat serta data
4	Topologi dan konfigurasi Jaringan Internet Pemkab Temanggung OPD yang mengecualikan : Dinkominfo	Pasal 25 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	2 Tahun	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data, pencurian akses internet	Melindungi/mengamankan perangkat serta data
5	Topologi dan konfigurasi jaringan Local Area Network (LAN) instansi di Lingkungan Pemkab Temanggung OPD yang mengecualikan : Dinkominfo	Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	2 Tahun	Orang yang tidak berkepentingan dapat merusak/mengubah isi/bentuk dari topologi dan jaringan LAN yang ada	Melindungi jaringan dan data yang ada dari kerusakan/perubahan dari pihak yang tidak bertanggung jawab
6	Buku assesment infrastruktur jaringan internet OPD yang mengecualikan : Dinkominfo	Pasal 30, 31 dan 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	2 Tahun	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data, pencurian akses internet	Melindungi/mengamankan perangkat serta data
7	Daftar user dan password perangkat jaringan OPD yang mengecualikan : Dinkominfo	Pasal 25, 31 dan 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	2 Tahun	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data	Melindungi/mengamankan perangkat serta data

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
8	Data aplikasi sebagai berikut: a Sistem operasi server yang digunakan b Bahasa pemrograman c Database d User dan password e Manual pengembangan website f IP public dan IP lokal untuk aplikasi yang di onlinekan OPD yang mengecualikan : Dinkominfo	Pasal 25, 31 dan 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	2 Tahun	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data	Melindungi/mengamankan perangkat serta data
II Informasi Pemerintahan					
9	Data dan kegiatan intelijen OPD yang mengecualikan : Bankesbangpol	- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara	- 2 Tahun	Membahayakan pemerintahan/negara	Melindungi data pemerintah/negara
III Informasi Hukum					
10	Daftar anggota/orang yang terlibat organisasi terlarang OPD yang mengecualikan : Bankesbangpol	- Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 66 ayat 3 huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	- 2 Tahun	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi
11	Data keberadaan orang asing di Kabupaten Temanggung OPD yang mengecualikan : Bankesbangpol	Permendagri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah	- Selama visa/passport berlaku	Berpotensi menimbulkan tindakan kriminal yang dapat mengancam	Keberadaan orang asing menjadi terlindungi

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
IV	Informasi Kesekretariatan				
12	Biodata anggota Perpustakaan Daerah yang memuat nama, NIK, alamat, nomor telepon, alamat elektronik OPD yang mengecualikan : Dinpusip	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan	2 Tahun	Penyalahgunaan data oleh orang yang tidak bertanggung jawab	Kerahasiaan dan perlindungan data pribadi
V	Informasi Keuangan dan Asset				
13	Dokumen Barang Milik Negara - Dokumen penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) yang sedang dalam proses (surat, nota dinas, berita acara, surat keputusan)	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	2 Tahun	Menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat terkait pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN	Memastikan keamanan pemanfaatan dan pemindahtanganan sarana prasarana BMN
VI	Informasi Inspektorat				
15	Dokumen pemeriksaan, reuiu, dan evaluasi OPD yang mengecualikan : Inspektorat	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j ; - Pasal 23 dan 26 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah - Pasal 4060 Standard AAIPi Bab Standar Komunikasi tentang Pendistribusian Dokumen Audit	- 2 Tahun	Dapat disalahgunakan oleh pihak- pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
16	Dokumen tindak lanjut hasil pemeriksaan OPD yang mengecualikan : Inspektorat	- Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 23 dan 26 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah - Standard AAPII Bab Standar Komunikasi Pasal 4060 tentang Pendistribusian Dokumen Audit	2 Tahun	Dapat disalahgunakan oleh pihak- pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab	Membantu badan publik dalam menyusun kebijakan
VII Informasi Kepegawaian					
17	Proses pemberian/penolakan izin cerai, beristri lebih dari seorang dan keterangan untuk melakukan perceraian. OPD yang mengecualikan : BKPSDM	- Pasal 66 ayat 3 huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan.	2 Tahun	- Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
18	Nilai hasil tes (tes potensi akademik, psikotes, kesehatan spiritual, tes kesehatan dan kebugaran, dan wawancara) dalam rangka penyaringan/penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil; OPD yang mengecualikan : BKPSDM	- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme	- 2 Tahun	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi
19	Data hasil tes potensi/kompetensi PNS/Pejabat OPD yang mengecualikan : BKPSDM	Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme	2 Tahun	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
20	Data rencana penempatan CPNS/PNS OPD yang mengecualikan : BKPSDM	Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme	Sampai dengan penyerahan Surat Keputusan	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Mencegah kolusi
21	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dalam proses dijatuhi hukuman: - Proses hukuman disiplin pegawai negeri sipil, keberatan atas hukuman disiplin PNS dan peninjauan kembali atas hukum disiplin PNS; - Proses pemberhentian PNS - Proses keputusan pemberhentian sementara karena dilakukan penahanan pihak yang berwajib; OPD yang mengecualikan : BKPSDM	- UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	- 2 Tahun	Mengungkap pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
22	Soal tes CPNS OPD yang mengecualikan : BKPSDM	Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme	Sampai dengan pengumuman hasil	Dapat disalahgunakan sehingga menimbulkan keresahan	Mencegah KKN

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
23	Data usulan pengangkatan, proses mutasi PNS dalam jabatan struktural dan fungsional, dan notulansi hasil rapat Baperjakat OPD yang mengecualikan : BKPSDM	- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian	Sampai diterbitkan Keputusan Bupati	Merugikan proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja
24	Biodata Elektronik PNS (Database) OPD yang mengecualikan : BKPSDM	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian Pasal 17 Huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terbuka untuk administrasi kepegawaian, kecuali data pribadi dan terkait disiplin	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak privasi PNS
25	Data presensi PNS OPD yang mengecualikan : BKPSDM	Pasal 17 Huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terbuka untuk administrasi kepegawaian, kecuali data yang bersifat rahasia dan belum final terkalkulasi pribadi dan terkait disiplin	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS
26	Daftar nilai seleksi jabatan struktural OPD yang mengecualikan : BKPSDM	Pasal 17 Huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terbuka sepanjang yang berkewenangan memberikan persetujuan tertulis dan khusus data pribadi	Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
27	Data PNS yang akan diangkat dalam Jabatan 1. Pimpinan Tinggi Pratama 2.Administrator 3.Pengawas OPD yang mengecualikan : BKPSDM	Pasal 17 Huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Sampai dengan pelantikan	Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS
28	Dokumen dan formulir isian pegawai OPD yang mengecualikan : BKPSDM	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan	Terbuka untuk administrasi kepegawaian, kecuali data pribadi dan terkait disiplin	Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak privasi PNS
29	Data yang masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan PPNS OPD yang mengecualikan : Satpol PP dan Damkar	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791) pasal 256 ayat (7) mengamanatkan pengaturan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan Peraturan Pemerintah.	2 Tahun	Penyelidikan akan gagal karena data/lokus kejadian dapat dirubah atau dihilangkan	Terselesaikannya masalah yang sedang terjadi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
VIII Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
30	Data client jaringan Dindukcapil OPD yang mengecualikan : Dindukcapil	Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	2 Tahun	Orang yang tidak berkepentingan dapat merusak / mengubah isi / bentuk dari jaringan yang ada	Melindungi jaringan dan data yang ada dari kerusakan / perubahan dari pihak yang tidak bertanggung jawab
33	User dan Password untuk Login SIAK dan KTP Elektronik OPD yang mengecualikan : Dindukcapil	Pasal 79 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	2 Tahun	Orang yang tidak berkepentingan dapat merusak/mengubah biodata seseorang	Melindungi data perusahaan yang bersifat rahasia
34	Database Kependudukan OPD yang mengecualikan : Dindukcapil	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	2 Tahun	Data pribadi disalahgunakan oknum tak bertanggung jawab	Melindungi data pribadi dari pihak yang tidak bertanggung jawab
35	Data pribadi WNI dan WNA OPD yang mengecualikan : Dindukcapil	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	2 Tahun	Data pribadi disalahgunakan oknum tak bertanggung jawab	Melindungi data pribadi dari pihak yang tidak bertanggung jawab

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
X	Informasi Kesehatan				
36	Rekam Medis OPD yang mengecualikan : RSUD	- Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 47 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran	2 Tahun	Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang	Melindungi rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang
37	Pelayanan Laboratorium Kesehatan OPD yang mengecualikan : Dinas Kesehatan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	2 Tahun	Dapat mengungkap rahasia kesehatan seseorang	Melindungi rahasia kesehatan seseorang
38	Data/informasi tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang diberikan kepada pasien, baik berupa dokumen/berkas (hardfile) dan atau elektronik (softfile). OPD yang mengecualikan : Dinas Kesehatan	Pasal 47 Ayat 2 dan Pasal 48 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Pasal 70 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan	2 Tahun	Terjadi tuntutan hukum bagi yang memberikan data/informasi pasien, dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang.	Kerahasiaan data/ informasi pasien tetap terjaga dan menghindari pelepasan data/informasi pasien kepada pihak yang tidak mempunyai hak.
39	Sistem Informasi Individu Tenaga Kesehatan OPD yang mengecualikan : Dinas Kesehatan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	2 Tahun	Akan timbul penyalahgunaan data pribadi tenaga kesehatan oleh pihak lain dan mengungkap kerahasiaan data tenaga kesehatan	Kerahasiaan data tenaga kesehatan akan terjamin

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
40	Kerahasiaan dan keamanan informasi kesehatan yang terdapat di aplikasi SIMPUS, dan SIPT OPD yang mengecualikan : Dinas Kesehatan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	2 Tahun	Pengelola SIK dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Data dan informasi tetap tersedia dan terjaga keutuhannya
41	Data/informasi by name by address terkait penderita stunting, data dan informasi terkait kegiatan penelitian OPD yang mengecualikan : Dinas Kesehatan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 63 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan Pasal 63 Ayat 1	2 Tahun	Terjadi tuntutan hukum bagi yang memberikan data/informasi	Kerahasiaan data/informasi penderita stunting terjaga
42	Data hutang pasien kepada RSUD OPD yang mengecualikan : RSUD	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf H	2 Tahun	Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi keuangan seseorang	Melindungi rahasia pribadi terkait kondisi keuangan seseorang
XI Informasi Sosial, Tenaga Kerja, dan UMKM					
43	Data pribadi orang asing dan tenaga kerja asing OPD yang mengecualikan : Dinperinaker	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	2 Tahun	Mengungkap data pribadi tenaga kerja asing yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi tenaga kerja asing yang bersifat rahasia
44	Data pribadi tenaga kerja OPD yang mengecualikan : Dinperinaker	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	2 Tahun	Mengungkap data pribadi tenaga kerja asing yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi tenaga kerja asing yang bersifat rahasia
45	Hasil mediasi (Perjanjian bersama/Putusan Bersama) OPD yang mengecualikan : Dinperinaker	Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	2 Tahun	Tidak terjaganya kebijakan perusahaan atau data perusahaan	Melindungi data perusahaan yang bersifat rahasia

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
46	Struktur dan Skala Upah (SUSU) OPD yang mengecualikan : Dinperinaker	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf H	2 Tahun	Mengungkap data perusahaan yang bersifat rahasia	Melindungi data perusahaan yang bersifat rahasia
47	Simfoni (Data Kekerasan Perempuan dan Anak) OPD yang mengecualikan : DPPPAPKB	Pasal 64 huruf i Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	2 Tahun	Ranah privasi korban dan proses hukum	Pendataan/pendampingan kasus kekerasan perempuan dan anak beserta solusi dan bantuan hukum
48	Data pribadi perusahaan OPD yang mengecualikan : Dinperinaker	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	2 Tahun	Mengungkap data pribadi perusahaan yang bersifat rahasia	Melindungi data perusahaan yang bersifat rahasia
49	Data pribadi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing OPD yang mengecualikan : Dinperinaker	Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	2 Tahun	Mengungkap data pribadi perusahaan yang bersifat rahasia	Melindungi data perusahaan yang bersifat rahasia
XII Lingkungan Hidup					
50	Proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran hukum dan perda PPNS dan rencana pengawasan usaha/ kegiatan oleh PPLHD (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup) OPD yang mengecualikan : DPRKPLH	- Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Sampai keluarnya putusan pengadilan yang memiliki ketetapan hukum	Menghambat proses penegakan hukum	Kelancaran proses penegakan hukum

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
51	Proses penyelidikan sengketa/konflik lingkungan OPD yang mengecualikan : DPRKPLH	- Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Sampai keluarnya putusan pengadilan yang memiliki ketetapan hukum	Menghambat proses penyelesaian sengketa/penegakan hukum	Kelancaran proses penyelesaian sengketa/penegakan hukum
XIII Informasi HAKI, Penelitian, dan Perijinan					
52	Dokumen perizinan yang diterbitkan terkait data keuangan, aset dan desain bangunan OPD yang mengecualikan : DPM	- Pasal 17 huruf h UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta	2 Tahun	Dapat mengungkap dokumen rahasia perusahaan/perorangan	Melindungi dokumen perusahaan/perorangan yang bersifat rahasia

Sekretaris Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Temanggung
Selaku PPID

Ttd.

ADI PITOKO, S.Sos, MM

Mengetahui,
Pj. Sekretaris Daerah
Selaku Atasan PPID

Ttd.

Agus Sujarwo